

## **PELATIHAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK GYA KARYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Enda Kartika Sari<sup>1)</sup>, Lisa Hermawati<sup>2)</sup>, Santi Indriani<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Baturaja

<sup>2)</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Baturaja

<sup>3)</sup> Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik & Hukum, Universitas Baturaja  
*endaunbara@gmail.com*

### **Abstract**

Gya Karya is a business group that produces paving blocks, located in Sukajadi Village, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. This business group was formed due to the increasing consumer demand for paving blocks, which reached 50 percent per year. The problem experienced by the Gya Karya business group is in the field of business management, namely the Gya Karya business group does not yet have business legality. The solution that needs to be provided is to provide business legality training to the Gya Karya business group and other business groups so that later business legality in the form of a Business Identification Number can be issued to this business group. The number of training participants was 29 people, from the Gya Karya business group and other MSME actors. The training was carried out by means of direct demonstration to the training participants by opening the Online Single Submission (OSS) program and participants followed the work steps of the presenter. The training materials provided to the training participants were Product Legality for UMKM and Business Licensing Practices. Before the training was carried out, a pre-test was carried out for the training participants and after the training, a post-test was carried out to see the participants' understanding of the material that had been given. The training results illustrate that the overall understanding of participants has increased by 62 percent after training and mentoring, in addition, NIB certificates can be issued. The management of this business legality not only provides short-term benefits, but also has a significant long-term impact on the growth and sustainability of Gya Karya's business.

*Keywords: Business permit, NIB, Business Group.*

### **Abstrak**

Gya Karya adalah kelompok usaha yang memproduksi paving block, terletak di Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Kelompok usaha ini terbentuk karena semakin meningkatnya kebutuhan konsumen akan paving block yaitu mencapai 50 persen per tahunnya. Permasalahan yang dialami Kelompok usaha Gya Karya adalah dibidang manajemen usaha yaitu kelompok usaha Gya Karya belum memiliki legalitas usaha. Solusi yang ingin diberikan adalah memberikan pelatihan legalitas usaha kepada kelompok usaha Gya Karya dan kelompok usaha lainnya sehingga nantinya legalitas usaha berupa Nomor Induk Usaha dapat diterbitkan pada kelompok usaha ini. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 29 orang, berasal dari kelompok usaha Gya Karya dan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Pelatihan dilakukan dengan cara demontrasi langsung kepada peserta pelatihan dengan cara membuka program Online Single Submission (OSS) dan peserta mengikuti langkah kerja dari pemateri. Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan adalah Legalitas produk bagi UMKM dan Praktek Perizinan Berusaha. Sebelum dilakukan pelatihan dilakukan terlebih dari pre-tes kepada peserta pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan dilakukan post-tes untuk melihat pemahaman peserta terhadap materi yang sudah diberikan. Hasil pelatihan tergambar bahwa pemahaman peserta secara keseluruhan mengalami peningkatan mencapai 62 persen setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, selain itu sertifikat NIB bisa diterbitkan. Pengurusan legalitas usaha ini bukan hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Gya Karya.

*Keywords: Izin usaha, NIB, Kelompok Usaha.*

## PENDAHULUAN

Serangkaian persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk mewujudkan legalitas usaha tersebut pemerintah telah menciptakan sistem layanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membuat perizinan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 (Dayantri, 2022). Legalitas ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai fasilitas yang mendukung pertumbuhan usaha. UMKM menjadi *necessary condition* untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Soimah & Imelda, 2023). Eksistensi pelaku usaha dalam berusaha dan beroperasi dan dinyatakan layak berdiri. Para pelaku UMKM memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. (Diana et al., 2022). Beberapa elemen penting dalam legalitas usaha salah satunya adalah NIB melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Saridewi et al., 2023). Aspek perizinan ini merupakan penyederhanaan tata cara perizinan menjadi pelayanan satu pintu (Subali Patma et al., 2021).

Identitas legal NIB yang diterbitkan dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) dan berfungsi

sebagai tanda legalitas usaha mencakup izin dasar untuk melakukan kegiatan usaha serta akses terhadap izin lain yang diperlukan. NIB ini memberikan sejumlah manfaat penting, termasuk perlindungan hukum dari perselisihan, akses pembiayaan dari lembaga formal, kepercayaan lebih besar dari mitra dan konsumen, serta peningkatan daya saing di pasar. Usaha yang memiliki legalitas yang lengkap dan jelas akan lebih mudah berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal-hal di atas maka perlu dilakukan pelatihan yang harus diberikan kepada pelaku usaha agar dalam pengajuan NIB sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi tahapan dalam OSS. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami pentingnya legalitas usaha dan prosedur serta persyaratan untuk mendapatkan legalitas usaha.

Gya Karya adalah kelompok usaha yang memproduksi paving block, terletak di Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Berita acara pembentukan kelompok usaha adalah Nomor 003/GK/IV/2018. Kelompok usaha ini terbentuk karena semakin meningkatnya kebutuhan konsumen akan *paving block* yaitu mencapai 50 persen per tahunnya. Permasalahan yang dialami Kelompok usaha Gya Karya adalah dibidang manajemen usaha yaitu kelompok usaha Gya Karya belum memiliki legalitas usaha. Usaha yang dijalankan belum ada izin usahanya. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh kelompok ini adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dilaksanakannya

pelatihan penerbitan Nomor Induk Berusaha adalah agar peserta pelatihan dapat dengan mudah mengakses dan mengikuti langkah-langkah penerbitan NIB dalam akun *Online Single Submission* (OSS) sehingga sertifikat NIB dapat diterbitkan.

## METODE

Pelatihan penerbitan Nomor Induk Berusaha dilakukan di Universitas Baturaja. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 29 orang, berasal dari kelompok usaha Gya Karya dan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Pelatihan dilakukan dengan cara demonstrasi langsung kepada peserta pelatihan dengan cara membuka program *Online Single Submission* (OSS) dan peserta mengikuti langkah kerja dari pemateri. Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan adalah Legalitas produk bagi UMKM dan Praktek Perizinan Berusaha. Sebelum dilakukan pelatihan dilakukan terlebih dari pre-tes kepada peserta pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan dilakukan post-tes untuk melihat pemahaman peserta terhadap materi yang sudah diberikan.

Proses penerbitan NIB untuk usaha Gya Karya dapat dilihat pada alur Gambar 1. Langkah-langkah dalam menerbitkan NIB adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah persiapan dokumen yaitu dengan mengumpulkan seluruh dokumen dan data yang diperlukan untuk mengisi formulir di OSS (*Online Single Submission*). Pastikan semua informasi akurat dan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

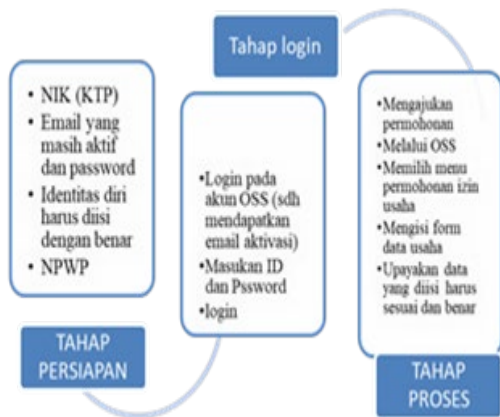
2. Tahap kedua adalah pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). Pendaftaran NIB dilakukan secara online melalui sistem

OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- o Masuk ke sistem OSS di website resmi.
- o Membuat akun OSS dengan menggunakan data NPWP pemilik atau usaha.
- o Mengisi formulir pendaftaran usaha, yang mencakup informasi seperti kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), data pemilik, dan alamat usaha.
- o Setelah data diinput dengan benar, sistem OSS akan menghasilkan NIB secara otomatis.

3. Tahap ketiga adalah verifikasi dan pengunduhan NIB. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, NIB Gya Karya akan terbit secara otomatis dan dapat diunduh langsung dari sistem OSS. Selanjutnya, dokumen-dokumen izin operasional dan izin komersial lain (jika diperlukan) juga dapat diajukan melalui platform OSS.

4. Tahap keempat melihat izin tambahan (jika diperlukan). Bila memerlukan izin khusus seperti izin lingkungan atau sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk paving block, izin-izin tersebut bisa diajukan melalui platform OSS atau instansi terkait. Tahapannya terlihat pada Gambar 1.

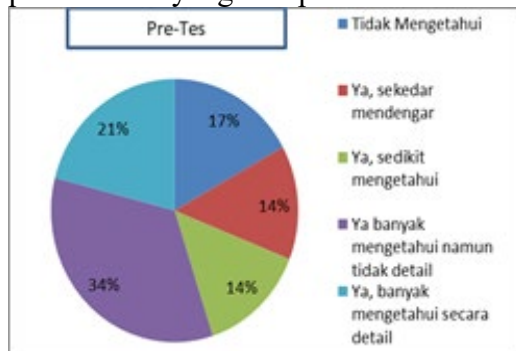


Gambar 1. Tahapan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil konkret dari pelatihan legalitas adalah komitmen dari kelompok usaha Gya Karya dan peserta lainnya dalam mengurus legalitas usahanya. Hasil pre-tes dan pos-tes yang diberikan didapatkan hasil sebagai berikut :

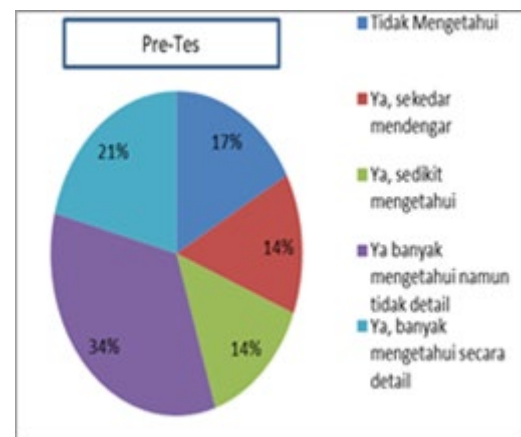
1. Pemahaman peserta tentang proses pengurusan legalitas usaha mikro didapatkan hasil bahwa sebelum dilakukan pelatihan hanya 17 persen peserta memahami secara detail tentang proses legalitas usaha mikro dan setelah pelatihan mengalami peningkatan menjadi 62 persen, dapat dilihat pada Gambar 2. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan mayoritas peserta pelatihan memiliki pengetahuan dasar tentang proses legalitas usaha mikro, namun membutuhkan pendalaman yang komprehensif.

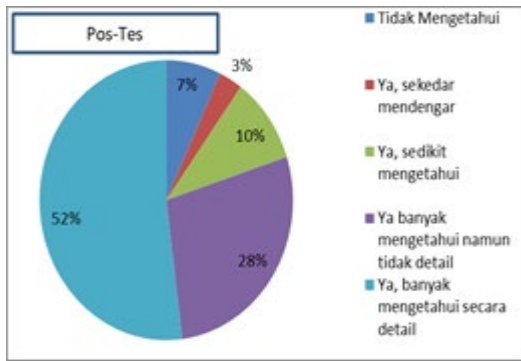


Gambar 2. Pemahaman proses legalitas usaha peserta

2. Pemahaman peserta tentang manfaat legalitas usaha

Pemahaman peserta tentang manfaat legalitas usaha didapatkan hasil bahwa sebelum dilakukan pelatihan hanya 21 persen peserta memahami secara detail tentang manfaat legalitas usaha dan setelah pelatihan mengalami peningkatan menjadi 52 persen, dapat dilihat pada Gambar 3. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan mayoritas peserta pelatihan telah memahami manfaat dari legalitas untuk kebutuhan usaha.

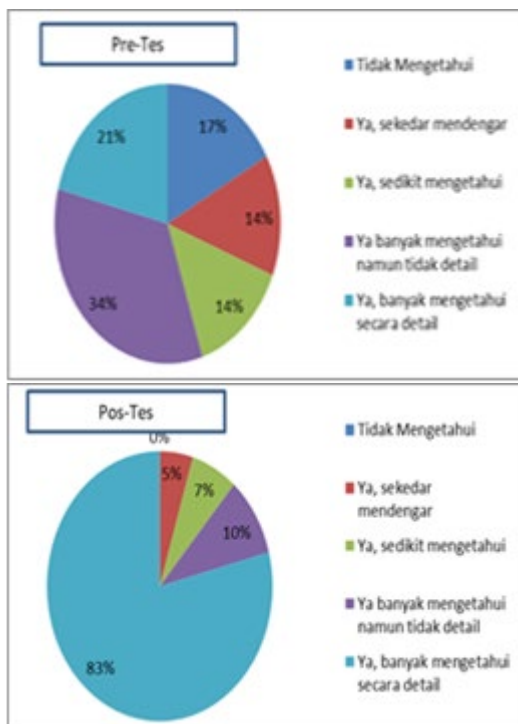




Gambar 3. Pemahaman peserta tentang manfaat legalitas usaha

### 3. Pengetahuan peserta tentang link online legalitas usaha

Peningkatan pengetahuan peserta mengenai link online legalitas usaha mengalami peningkatan hingga mencapai 83 persen yang sebelumnya hanya 34 persen, dapat dilihat pada Gambar 4. Peningkatan ini dikarenakan peserta telah mengikuti pelatihan legalitas usaha dan praktek perizinan usaha. Dari pelatihan peserta menjadi lebih paham tentang pengurusan legalitas di akun OSS.



Gambar 4. Pengetahuan peserta tentang link online legalitas usaha

Dalam dunia usaha atau bisnis, adanya legalitas usaha atau izin usaha merupakan hal yang sangat penting (Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung1, 2024). Pengabaian legalitas usaha bagi pelaku UMKM ini dikarenakan pelaku usaha hanya fokus pada kegiatan jual beli saja. (Asyrafi et al., 2024) Pelatihan mengenai urgensi legalitas usaha kepada UMKM dilakukan oleh Dr. Santi Indriani, MH. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam hal ini adalah kelompok usaha Gya Karya dan kelompok usaha lainnya. Pendampingan dan pemahaman ini sangatlah perlu dilakukan terutama bagi masyarakat yang tergabung dalam suatu komunitas yang perlu berkembang dalam berbagai aspek pembangunan tidak terkecuali pengembangan UMKM (Ismanto et al., 2024). Pelaksanaan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Pelatihan Legalitas usaha melalui OSS (Online Single Submission)

Dengan izin usaha ini kelompok usaha **Gya Karya** mendapatkan pengakuan hukum dan kemudahan operasional. Gya Karya, yang bergerak di bidang produksi paving block memerlukan legalitas usaha agar dapat beroperasi secara resmi dan mendapatkan berbagai manfaat yang mendukung pengembangan bisnisnya. Legalitas usaha melalui NIB memberikan landasan hukum yang jelas bagi Gya Karya. Selain itu sebagai izin komersial atau operasional bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (Nurmalasari et al., 2023). Dengan legalitas ini, Gya Karya diakui sebagai entitas bisnis yang sah oleh pemerintah, yang memungkinkan bagi Gya Karya untuk :

- a) Beroperasi secara legal dan diakui oleh instansi pemerintah,
- b) Memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas pembiayaan dan bantuan dari pemerintah atau lembaga keuangan formal dan
- c) Menjalankan kegiatan usaha dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, sehingga risiko sengketa atau masalah hukum bisa diminimalisasi.

Legalitas Usaha dari Kelompok Usaha Gya Karya yang sudah di daftarkan di OSS dan sudah terbit dapat dilihat pada Gambar 6.

Beberapa manfaat penting yang diperoleh kelompok usaha Gya Karya setelah berhasil mendapatkan NIB antara lain

- 1) Dimudahkan dalam proses pembiayaan dengan lembaga keuangan yang sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha. (leiwakabessy & lahallo, 2019). Dengan adanya legalitas yang sah lembaga pembiayaan tidak ragu lagi dalam memproses pembiayaan dan permodalan,
- 2) Kelompok usaha Gya karya dapat berpartisipasi dalam menerima bantuan dan insentif dari pemerintah dalam bentuk pendanaan, subsidi dan pelatihan,
- 3) Legalitas usaha

memberikan peluang bagi kelompok usaha untuk memperluas pangsa pasar dan menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dan tender proyek pemerintah dan

- 4) Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis sehingga reputasi dari kelompok usaha menjadi meningkat.



Gambar 6. Legalitas Usaha (NIB dan SPPL)



Pengurusan legalitas usaha bukan hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Gya Karya. Terbitnya legalitas usaha merupakan kepatuhan hukum membuat Gya Karya dapat lebih mudah mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan dan kepesertaan dalam BPJS bagi karyawan. Dalam menghadapi sengketa hukum atau klaim dari pihak ketiga, NIB memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi usaha, mengurangi risiko kerugian. Legalitas usaha juga memungkinkan Gya Karya bersaing secara lebih profesional di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Produk yang dihasilkan dapat mengikuti standar yang lebih tinggi dan mendapatkan sertifikasi, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia), untuk memperkuat posisi di pasar nasional dan internasional.

## SIMPULAN

Pengurusan legalitas usaha melalui NIB (Nomor Induk Berusaha) memberikan dasar yang kuat bagi kelompok usaha Gya Karya untuk berkembang. Dengan memiliki NIB, Gya Karya dapat beroperasi secara sah, mengakses berbagai fasilitas dan program pemerintah, serta meningkatkan kredibilitas di mata konsumen dan mitra bisnis. Pengurusan legalitas ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnis jangka panjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan ini disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Pendanaan Hibah Pengabdian Berbasis Masyarakat Ruang Lingkup Pengabdian Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 pada Mitra Kelompok Usaha Gya Karya. Ucapan terima kasih di sampaikan kepada kelompok usaha Gya Karya yang bersedia menjadi mitra dalam Pengabdian Berbasis Masyarakat, sehingga kegiatan Pengabdian Berbasis Masyarakat dalam ruang lingkup Pengabdian Kemitraan Masyarakat dapat berjalan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyraf, A. H. A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 127–135. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1163>
- Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung, N. A. P. (2024). *Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang*. 10(June), 98–106.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik>

- v1i5.69  
Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Ismanto, K., Tarmidzi, T., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>
- leiwakabessy, piter, & lahallo, fensca fenolisa. (2019). Pembiayaan USAha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas USAha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.34124/266967>
- Nurmalasari, N., Zakiyyah, A. N., Padillah, A. R., Rohiman, R., & Hidayat, Y. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 59–64. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603>
- Saridewi, A., Aldiansyah, R., Nilda, E., Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kerinci, M., & Manajemen Bisnis Syariah FEBI IAIN Kerinci, M. (2023). Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bento Kabupaten Kerinci. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 13–18.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha. *Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*, September, 246–249. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/download/4403/2175>